Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan secara nasional. Capaian kinerja makro dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Makro} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2024} - \text{Capaian Kinerja Tahun 2023}}{\text{Capaian Kinerja Tahun 2023}} \times 100\%$$

Capaian kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,64	76,43	1,044 %
2.	Angka Kemiskinan (%)	5,95	5,42	-8,908 %
3.	Angka Pengangguran (ribu orang)	5,94	5,75	-3,199 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,36	-5,628 %
5.	Pendapatan per Kapita	33.188,21	34.167,59	2,95 %
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,280	0,283	1,071 %

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2024

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
				Capaian	Ket
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 243.200	84,49 %	
			Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan = 287.838		
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 5.893	81,93 %	
			Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 7.127		

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
				Capaian	Ket
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 8.218	0,14 %	
			Jumlah Penduduk provinsi = 5.820.359		
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 5	100 %	
			Jumlah RS provinsi = 5		
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 266.553	100 %	
			Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 266.553		
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 500.952	100 %	
			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 500.952		
1.c.1.1	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 2.002,87	10,018 %	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 19.993,07		
1.c.1.2	PU dan PR	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 92,1	4,426 %	
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 2080,72		
1.c.2	PU dan PR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 31.726	48,804 %	
			luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 65.007		
1.c.3	PU dan PR	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap pemenuhan kapasitas yang	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota = -.	-	
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. = -		

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
				Capaian	Ket
		memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			
1.c.4	PU dan PR	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = - Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = -	-	
1.c.5	PU dan PR	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 1.192,64 Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 1.690,5	70,55 %	
1.c.6	PU dan PR	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli = 120 Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi = 356	33,71 %	
1.d.1	Perkim	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0	-	
1.d.2	Perkim	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	-	
1.d.3	Perkim	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani = 6,88 Luas kawasan kumuh 10-15 Ha = 19,5	35,28 %	
1.d.4	Perkim	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 61 Jumlah satuan perumahan = 322	18,94 %	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 10 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 12	83,33 %	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 19 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 19	100 %	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 2 Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 3	66,67 %	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
				Capaian	Ket
		sah/legal			
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 8	42 %	
			Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 19		
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 19.	100 %	
			Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 19		
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 450	100 %	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 450		
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 3.678	100 %	
			Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 3.678		
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 220	100 %	
			Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 220		
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 30	100 %	
			Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 30		
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 75	100 %	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 75		

C. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Hasil EPPD

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa

EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 21 di jelaskan bahwa Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Berikut adalah hasil EPPD Provinsi Sumatera Barat:

**Peringkat, Nilai dan Prestasi Kinerja EPPD
Provinsi Sumatera Barat Secara Nasional**

No.	LPPD Tahun	Nilai	Prestasi Kinerja	Dasar Hukum
1.	2017	2,8511	Tinggi	Kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017.
2.	2018	3,0155	Sangat Tinggi	Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri
3.	2019	-	-	-
4.	2020	-	-	-
5.	2021	2,6000	Rendah	Kepmendagri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
6.	2022	2,7333	Sedang	Kepmendagri No. 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.
7.	2023	-	-	Hasil belum ditetapkan

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara, telah memeriksa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akutansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2024**

No.	Tahun	Opini Laporan Keuangan	Keterangan
1.	2017	WTP	

No.	Tahun	Opini Laporan Keuangan	Keterangan
2.	2018	WTP	
3.	2019	WTP	
4.	2020	WTP	
5.	2021	WTP	
6.	2022	WTP	
7.	2023	WTP	
8.	2024	-	Masih dalam proses pemeriksaan BPK

D. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan substansi laporan ini, perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran belanja tahun 2024 APBD Provinsi Sumatera Barat ditargetkan sebesar **Rp.6.857.294.152.520,00** terealisasi sebesar **Rp.6.472.706.889.087,13** atau **94,39%**. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu **Rp. 6.263.878.436.851,68**, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	⁵ =(4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.857.294.152.520,00	6.472.706.889.087,13	94,39	6.263.878.436.851,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.342.769.899.590,00	2.932.851.823.548,13	87,74	2.784.774.801.212,68
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	90.413.363.011,64	85,77	414.918.265.293,68
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.342.769.899.590,00	2.932.851.823.548,13	87,74	2.784.774.801.212,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.497.500.252.930,00	3.525.560.271.539,00	100,80	3.464.761.720.139,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.857.294.152.520,00	6.472.706.889.087,13	94,39	6.263.878.436.851,68
5	BELANJA DAERAH	7.017.741.696.945,19	6.514.227.304.376,86	92,83	6.352.991.353.501,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.853.518.637.062,19	4.603.605.427.724,75	94,85	4.419.911.196.952,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.693.957.283,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.793.366.756.065,75	92,67	1.964.366.347.632,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.853.518.637.062,19	4.603.605.427.724,75	94,85	4.419.911.196.952,00
5.2	BELANJA MODAL	856.550.234.585,00	765.480.831.680,35	89,37	991.975.692.931,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 =(4/3)*100	6
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.121.074.351,00	84,46	306.440.774.536,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.325,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	856.550.234.585,00	765.480.831.680,35	89,37	991.975.692.931,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46	87,88	941.104.463.618,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46	87,88	941.104.463.618,00
	JUMLAH BELANJA	7.017.741.696.945,19	6.514.227.304.376,86	92,83	6.352.991.353.501,00
	SURPLUS/DEFISIT	(160.447.544.425,19)	(41.520.415.289,73)	25,88	(89.112.916.649,32)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	160.447.544.425,19	159.981.015.714,19	99,71	269.560.461.073,38
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	160.447.544.425,19	159.981.015.714,19	99,71	269.560.461.073,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	118.460.600.424,46	0,00	180.447.544.424,06

E. Inovasi Daerah

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- peningkatan Pelayanan Publik;
- pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- peningkatan daya saing Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11- 4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Indeks Inovasi daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 88,92 dengan predikat **Sangat Inovatif**.